

REVISI II

RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR KARANTINA
PERTANIAN MAKASSAR
TAHUN 2015-2019



Balai Besar Karantina Pertanian Makassar

2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2015 – 2019 dapat diselesaikan dengan baik atas dukungan dan kerjasama seluruh Pejabat Struktural, Fungsional POPT Ahli, Terampil, Medik dan Paramedik Veteriner dan Fungsional Umum.

Renstra ini berkaitan dengan strategi Badan Karantina Pertanian, sehingga dapat dijadikan acuan dalam membangun komunikasi antara Balai Besar Karantina Pertanian Makassar dengan Badan Karantina Pertanian serta instansi terkait, pengguna jasa/masyarakat, agar kegiatan perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi dapat dilaksanakan dengan baik secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMP II 2015 – 2019)

Dalam penyusunan Renstra BBKP Makassar Tahun 2015 – 2019 disadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu akan diperbaiki sesuai dengan perkembangan lingkungan strategi dan kami bersedia menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan renstra tersebut. Akhirnya semoga Renstra ini bermamfaat bagi kita semua.

Makassar, 14 Juni 2016

Kepala Balai



Dr. Hermansyah, SH., MM
NIP. 19580917 198202 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Visi, Misi, Motto dan Nilai-nilai | 3 |
| 1.2.1. Visi | 3 |
| 1.2.2. Misi | 4 |
| 1.2.3. Motto | 5 |
| 1.2.4. Nilai-nilai | 5 |
| 1.3. Tujuan dan Sasaran | 6 |
| 1.3.1. Tujuan | 6 |
| 1.3.2. Sasaran | 6 |
| 1.3.3. Program Kerja | 7 |
| 1.4. Profil Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar | 7 |
| 1.4.1. Struktur Organisasi, SDM, Sarana Dan Prasarana, Wilayah Kerja | 6 |
| A. Struktur Organisasi..... | 7 |
| B. Profil Sumber Daya Manusia | 9 |
| C. Sarana Dan Prasarana | 10 |
| D. Wilayah Kerja | 12 |
| 1.4.2. Tugas Pokok fungsi dan Karakteristik | 14 |
| A. Tugas Pokok dan Fungsi | 14 |
| B. Karakteristik BBKP Makassar | 16 |
| C. Geografis Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar | 17 |
| D. Data Frekuensi/Volume Lalu Lintas | 19 |
| BAB II IDENTIFIKASI MASALAH | 20 |
| 2.1. Permasalahan Operasional | 20 |
| A. Permasalahan Operasional Bidang Karantina Hewan | 20 |
| B. Permasalahan Operasional Bidang Karantina Tumbuhan | 20 |
| C. Permasalahan Operasional Bidang Pengawasan dan Tindakan ... | 21 |

| | | |
|---------|---|----|
| | 2.2. Permasalahan Non Operasional | 22 |
| | 2.3. Isu-isu Strategis | 22 |
| BAB III | KEBIJAKAN DAN STRATEGI | 24 |
| | 3.1. Kebijakan Kementerian Pertanian dan Keterkaitan strategi badan karantina pertanian | 24 |
| | 3.2. Strategi dan Kegiatan | 26 |
| | 3.3. Analisa Resiko Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT) | 30 |
| | 3.4. Rencana Kerja Sampai Dengan 5 Tahun (2015-2019) | 41 |
| BAB IV | PENUTUP..... | 44 |
| | - Lampiran Matriks Renstra BBKP Makassar 2015– 2019 | 45 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis saat ini turut mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam pembangunan pertanian, berupa munculnya tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi dan dimanfaatkan untuk pembangunan pertanian yang modern.

Dalam struktur perekonomian Indonesia, sektor pertanian berperan penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Banyak sektor-sektor lain membutuhkan bahan baku yang dihasilkan oleh sektor pertanian. Kinerja sektor pertanian sangat dibutuhkan untuk menopang sektor industri lain. Lebih-lebih sektor ini menjadi salah satu parameter utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan nasional, terkait dengan upaya mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu upaya keras untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian. Salah satu sub sektor pertanian yang perlu mendapatkan perhatian adalah Badan Karantina Pertanian, apalagi bila dikaitkan dengan perdagangan internasional dimana Badan Karantina Pertanian merupakan pelaksana fungsi penerapan Sanitary and Phytosanitary.

Pembangunan karantina pertanian pada tahun 2015 – 2019 bertumpu pada program peningkatan kualitas perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati tidak terlepas dari dukungan Badan Karantina Pertanian terhadap empat target sukses Kementerian Pertanian yaitu :

1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan;
2. Peningkatan diversifikasi pangan;
3. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor;
4. Peningkatan kesejahteraan petani.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, Pemerintah Indonesia telah menentukan pilihan bahwa salah satu strategi untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan adalah melalui penyelenggaraan perkarantinaan dan telah diuraikan dengan jelas, bahwa tanah air dan Wilayah Negara Republik Indonesia yang kaya akan sumber daya alam hayati perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman HPHK dan OPTK yang dapat menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap stabilitas ekonomi atau bahkan dapat mengakibatkan kematian pada manusia. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut karantina pertanian ditempatkan sebagai benteng terdepan pertahanan pertanian yang dilaksanakan oleh Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk mendukung kelancaran tugas operasional perkarantinaan, diperlukan adanya perencanaan strategis yang merupakan salah satu alat manajemen yang akan menentukan arah organisasi selama lima tahun kedepan (Tahun 2015–2019). Untuk itu Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar dalam melaksanakan pembangunan perkarantinaan di Sulawesi Selatan mengacu pada visi Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar yaitu :

“Menjadi Karantina yang Handal dan Akuntabel Dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati Guna Pencapaian Swasembada Pangan dan Mendorong Akselerasi Ekspor Serta Ketahanan dan Keamanan Pangan di Sulawesi Selatan”

Berdasarkan visi tersebut Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar telah menetapkan kegiatan-kegiatan sebagai langkah awal yang harus ditempuh serta menjawab pembangunan karantina pertanian berkelanjutan.

Untuk melaksanakan perencanaan yang realistis terhadap pembangunan dan pengembangan karantina pertanian yang dituangkan dalam rencana strategis guna memberikan gambaran atau sebagai informasi dalam hal penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan jangka menengah (5 tahun) kedepan, sehingga jelas arah, tujuan, sasaran serta kebijakan pembangunan perkarantina dalam perannya untuk mewujudkan pelestarian sumberdaya alam hayati, dan pengawasan keamanan pangan.

Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar membawahi beberapa wilayah kerja yang terdiri atas : Bandar Udara Hasanuddin, Pelabuhan Laut Soekarno Hatta, Pelabuhan Laut Paotere, Pelabuhan Laut Bulukumba, Pelabuhan Laut Bajoe, Pelabuhan Laut Selayar, Pelabuhan Laut Tuju-Tuju Bone, Pelabuhan Laut Larea-rea, Pelabuhan Laut Jeneponto dan Kantor Pos dan Giro. Wilayah kerja tersebut merupakan obyek dari pembangunan karantina pertanian di Sulawesi Selatan karena merupakan pintu masuk dan keluar (*entry and exit point*) lalu lintas perdagangan komoditas pertanian berupa hewan dan tumbuhan.

1.2 Visi, Misi, Motto dan Nilai-Nilai

1.2.1 Visi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan realistik yang dipilih dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, dapat terjangkau, dipercaya, menyakinkan serta mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan suatu organisasi dalam menghadapi hambatan dan tantangan masa depan. Oleh karena itu Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ditetapkan visi yang akan dicapai dalam penyelenggaraan perkarantina pertanian

sebagai berikut :**“Menjadi Karantina yang Handal dan Akuntabel Dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati Guna Pencapaian Swasembada Pangan dan Mendorong Akselerasi Ekspor Serta Ketahanan dan Keamanan Pangan di Sulawesi Selatan”**

1.2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas dalam penyelenggaraan perkarantina pertanian telah ditetapkan misi ***“Meningkatkan tata kelola sistem perkarantina dalam melindungi sumber daya hayati hewan, tumbuhan dari ancaman HPHK, OPTK dan pangan segar dari cemaran nuklir, biologis, kimia”***.

- a. Meningkatkan tata kelola sistem perkarantina dalam melindungi sumberdaya hayati hewan, tumbuhan dari ancaman HPHK, OPTK dan pangan segar dari cemaran nuklir, biologis, kimia.
- b. Meningkatkan daya saing komoditas hewan dan tumbuhan dalam perdagangan domestik dan internasional.
- c. Mendorong terwujudnya peran karantina dalam akselerasi ekspor kakao dan komoditas unggulan pertanian lainnya di Sulawesi Selatan yang akseptabel dan mampu bersaing di pasar internasional.
- d. Mewujudkan sistem Manajemen Mutu Pelayanan dengan mengimplementasikan secara konsisten ISO 9001:2008/SNI 19-9001-2008.
- e. Meningkatkan kompetensi sebagai Laboratorium Penguji (*Testing Laboratory*) mengimplementasikan secara konsisten SNI 17025:2008
- f. Meningkatkan Kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perkarantina Hewan dan Tumbuhan

g. Meningkatkan sarana dan prasarana, teknologi yang aplikatif dengan sistem komputerisasi

1.2.3 Motto

Motto dari Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar :

“Bersama Anda Melindungi Negeri”

1.2.4 Nilai-nilai

Nilai-nilai yang ditanamkan dalam organisasi agar membudaya dalam keseharian organisasi. Falsafah tidaklah berdiri sendiri tetapi diturunkan dari visi dan misi, tujuannya agar nilai-nilai yang dibudayakan akan menjadi perilaku setiap individu dalam organisasi agar tidak menyimpang dari visi dan misi.

Nilai-nilai yang dibudayakan dilingkungan organisasi Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar yaitu :

- Berfikir strategis untuk mencapai tujuan, artinya kami selalu berupaya melakukan pilihan terbaik dalam mencapai tujuan;
- Berlaku amanah dalam mengemban tugas, mengandung arti professional yaitu selalu mengembangkan kemampuan secara terus menerus dalam bidang tugasnya dan bertanggung jawab yaitu menggunakan sumberdaya dengan efektif dan efisien;
- Inovatif, terus kreatif mengembangkan cara-cara terbaik dalam mencapai tujuan;
- Bekerjasama dan komunikatif, kami berkomunikasi untuk memahami kebutuhan stakeholder dan bekerjasama baik internal maupun eksternal dalam mencapai tujuan;
- *Science base*, kami memahami bahwa karantina adalah pengelolaan resiko oleh karena itu selalu mempertimbangkan aspek teknologi dan ilmu pengetahuan dalam memutuskan kebijakan;

- Berdedikasi dalam pelayanan, kami berusaha memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin.

1.3 Tujuan, Sasaran dan Program Kerja

1.3.1 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan karantina pertanian tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sistem perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati, lingkungan dan keamanan pangan nasional
- b. Menyelenggarakan perkarantinaan secara efektif, efisien, transparan dan akutable
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN
- d. Meningkatkan teknik dan metode karantina sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.3.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan perkarantinaan sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran pembangunan karantina pertanian tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk memenuhi standar pelayanan operasional perkarantinaan di Balai dan wilayah kerja.
- b. Terpenuhinya kompetensi dan kemampuan pejabat fungsional medik, paramedik veteriner dan POPT ahli/terampil dalam peningkatan sertifikasi ekspor, impor dan domestik.
- c. Terwujudnya status laboratorium karantina hewan dan karantina tumbuhan yang terakreditasi, agar hasil uji kredibel.
- d. Terselenggaranya pengembangan sistem informasi perkarantinaan dengan sistem komputerisasi yang aplikatif.

- e. Terjalinnnya kerjasama antar instansi terkait melalui forum koordinasi komunikasi dan sosialisasi.
- f. Terwujudnya tingkat kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan

1.3.3 Program Kerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar menetapkan program kerja sebagai berikut :

1. Pengembangan SDM yang professional;
2. Penguatan dan penataan kelembagaan;
3. Pengembangan kerjasama dan “Public Awareness”;
4. Pengembangan teknologi dan sistem informasi;
5. Pengembangan kepatuhan masyarakat tentang perundang-undangan perkarantinaan;
6. Pengembangan infastruktur sarana dan prasarana;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan manajemen pelayanan publik yang prima.

1.4 Profil Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar

1.4.1 Struktur Organisasi, SDM, Sarana dan Prasarana, Wilayah Kerja

A. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No.22./Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, dengan berlakunya permentan tersebut adalah merupakan petunjuk pelaksanaan atau pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi. Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP)

Makassar adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian sebagai eselon I Departemen Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. Namun secara operasional tindakan karantina pertanian di koordinasikan dengan instansi terkait di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kota, agar tupoksi organisasi dapat dilaksanakan secara optimal serta mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat.

Unit Pelaksana teknis Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar terdiri dari beberapa pejabat struktural eselon II-b, III-b, dan IV-a, serta kelompok jabatan fungsional medik veteriner, paramedik veteriner dan jabatan fungsional pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Struktur Organisasi Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar berdasarkan Permentan No.22/Permentan /OT.140/4/2008 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BBKP MAKASSAR



B. Profil Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan tugas operasional perkarantinaan di wilayah kerja lingkup Balai Besar Karantina Pertanian Makassar berdasarkan UU No.16 tahun 1992 tentunya diharapkan adanya ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan secara optimal. Jumlah pegawai Balai Besar Karantina Pertanian Makassar pada tahun anggaran 2015 adalah sebanyak 157 orang yang tersebar di Balai, laboratorium karantina hewan dan karantina tumbuhan, serta di wilayah kerja lingkup BBKP Makassar.

Oleh karena itu ketersediaan jumlah personil atau pegawai tersebut di atas dengan berbagai jenis kualifikasi sumber daya manusia baik berdasarkan, pangkat dan golongan, pendidikan, tugas dan jabatan, jenis kelamin, masa kerja dan usia terlihat pada tabel sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

| Pangkat/Golongan | Jumlah | Presentase |
|------------------|-----------|------------|
| Golongan IV | 14 Orang | 8,92% |
| Golongan III | 98 Orang | 62,42% |
| Golongan II | 45 Orang | 28,66% |
| Golongan I | 0 | - |
| Jumlah | 157 orang | 100 % |

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Tingkat Pendidikan | Jumlah | Presentase |
|--------------------|-----------|-------------|
| S3 | 1 Orang | 1% |
| S2 | 30 orang | 19% |
| S1 | 51 orang | 32% |
| D3 | 16 orang | 10% |
| SLTA | 58 orang | 37% |
| SLTP | 0 | 0% |
| SD | 1 orang | 1% |
| Jumlah | 157 orang | 100% |

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jabatan

| Jabatan | Jumlah | Presentase |
|--------------------------|-----------|-------------|
| Pejabat Struktural | 14 orang | 9% |
| Fungsional Umum | 56 orang | 36% |
| Fungsional Medik Vet | 10 orang | 6% |
| Fungsional Par. Vet | 22 orang | 14% |
| Fungsional POPT Ahli | 29 orang | 18% |
| Fungsional POPT Terampil | 26 orang | 17% |
| Jumlah | 157 orang | 100% |

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah | Presentase |
|---------------|-----------|-------------|
| Laki-laki | 89 orang | 43% |
| Perempuan | 68 orang | 57% |
| Jumlah | 157 orang | 100% |

e. Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

| Masa Kerja | Jumlah | Presentase |
|-----------------|-----------|-------------|
| 1 s/d 5 tahun | 50 orang | 32% |
| 6 s/d 10 tahun | 34 orang | 22% |
| 11 s/d 15 tahun | 25 orang | 16% |
| 16 s/d 20 tahun | 24 orang | 15% |
| 21 tahun keatas | 24 orang | 15% |
| Jumlah | 157 orang | 100% |

f. Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

| Usia | Jumlah | Presentase |
|---------------|-----------|-------------|
| <20 tahun | 1 orang | 1% |
| 20 - 30 tahun | 25 orang | 16% |
| 31 – 40 tahun | 58 orang | 37% |
| 41 – 50 tahun | 33 orang | 21% |
| >50 Tahun | 40 orang | 25% |
| Jumlah | 157 orang | 100% |

Selain pejabat struktural, fungsional, tenaga teknis dan administrasi BBKP Makassar tersebut di atas dalam melaksanakan tugas operasional perkarantinaan juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), polisi khusus dan intelejen. Pegawai tersebut sebelumnya diberi pendidikan dan pelatihan khusus sesuai bidangnya masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan

tugas operasional perkarantinaan di lapangan serta melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan –ketentuan yang berlaku dibidang perkarantinaan sesuai UU.No.16 tahun 1992, PP.No.82 tentang Karantina Hewan dan PP.No.14 tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas operasional perkarantinaan di wilayah kerja lingkup BBKP Makassar terkadang ditemukan masyarakat pemakai jasa karantina melakukan pelanggaran mengenai perkarantinaan, maka dalam rangka terwujudnya penegakan supremasi hukum dibidang perkarantinaan diperlukan adanya petugas khusus yang menangani permasalahan tersebut diatas dan bekerjasama dengan kepolisian setempat. Adapun jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polsus dan Intelejen sebagai berikut :

| Uraian | Jumlah | Keterangan |
|-----------|----------|-----------------|
| PPNS | 14 orang | Diklat PPNS |
| Polsus | 2 orang | Diklat Polsus |
| Intelejen | 6 orang | DiklatIntelijen |

C. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berupa gedung perkantoran telah dibangun di Balai dan di wilayah kerja, laboratorium karantina hewan, laboratorium karantina tumbuhan, instalasi kandang karantina hewan serta grand house. Pembangunan sarana tersebut dibangun di atas tanah milik BBKP Makassar kecuali Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Paotere dibangun di atas tanah milik Pelindo dan pembangunan tersebut berdasarkan persetujuan Pelindo Makassar. sarana pendukung lainnya berupa kendaraan operasional roda 2 sebanyak 61unit, roda 4 sebanyak 19 unit dan roda 6 sebanyak 1 unit. Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 telah didistribusikan kepada masing-masing pejabat struktural, fungsional dan staf berdasarkan keputusan Kepala BBKP Makassar, sedangkan peralatan meubelair, komputer 68

unit, laptop 36 unit printer 66 unit, alat dan bahan laboratorium telah didistribusikan ke laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan wilayah kerja lingkup Balai, guna mendukung kelancaran tugas operasional perkarantinaan di lapangan. Sarana dan prasarana dimaksuddilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan anggaran yang tersedia.

D. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian No.22/Permentan/OT.140/4/2008, dengan berlakunya permentan tersebut adalah merupakan dasar pelaksanaan tugas operasional perkarantinaan di daerah pabean yang meliputi semua tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang berada di Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten kota, kecuali wilayah kerja Stasiun Karantina Pertanian Pare-Pare. Pelaksanaan tugas operasional perkarantinaan di masing-masing wilayah kerja telah ditempatkan pegawai teknis dan fungsional serta administrasi dan ditunjuk seorang penanggung jawab wilayah kerja berdasarkan keputusan Kepala Balai, untuk mengkoordinir pelaksanaan tindakan karantina pertanian. Adapun wilayah kerja Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar sebagai berikut :

WILAYAH KERJA BBKP MAKASSAR

1. Wilker Bandara Sultan Hasanuddin (E, I, AA)
2. Wilker Pel. Laut Paotere (AA)
3. Wilker Pel. Laut Soekarno Hatta Makassar (E, I, AA)
4. Wilker Kantor Pos Makassar (E, I, AA)
5. Wilker Pel. Laut Bulukumba (E, AA)
6. Wilker Pel. Laut Jenepono (E, AA)
7. Wilker Pel. Laut Bajoe (AA)
8. Wilker Pel. Laut Tuju Tuju (AA)
9. Wilker Pel. Laut Selayar (Wilker Pelut Selayar/Pel. Penyeb. Patumbaka, Wilker Pelut Selayar/Pel. Penyeb. Bonatata, Wilker Pelut Selayar/Pel. Penyeb. Benteng, Wilker Bandara Selayar) (E, AA)
10. Wilker Pel. Laut Larea-Rea Sinjai (AA)



1.4.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Karakteristik

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Penjelasan Undang-undang No.16 tahun 1992, tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan karantina pertanian, telah diuraikan dengan jelas bahwa Wilayah Negara Republik Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan HPHK dan OPTK yang dapat menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap stabilitas ekonomi dan keberhasilan usaha agribisnis serta kestabilan ketahanan pangan nasional.

Untuk itu salah satu upaya perlindungan sumberdaya alam hayati tersebut adalah diselenggarakannya tindakan karantina pertanian yang merupakan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan Permentan No. 22/ Permentan/ OT.140/ 4 /2008, pasal 2 sebagai berikut : **Melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani, nabati.**

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, petugas karantina pertanian tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi sumber daya alam hayati dari ancaman HPHK dan OPTK serta mempertahankan status bebasnya Indonesia dari penyakit hewan menular utama (*Major epizootic disease*) dan organisme pengganggu tumbuhandari kemungkinan masuk dan tersebarnya agen penyakit karantina dari luar negeri serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.22/Kpts/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Pertanian, menyatakan bahwa Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar adalah salah satu unit

pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian sebagai eselon I Departemen Pertanian. Namun secara operasional tugas perkarantinaan tetap dikoordinasikan dengan aparat instansi terkait di daerah, agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan secara optimal serta mendapat dukungan dari pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten kota. Untuk itu Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan evaluasi;
2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa HPHK dan OPTK;
3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan.
9. Pelaksanaan pengawasan dan peningkatan penganggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati.
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan tugas dan fungsi organisasi tersebut di atas agar dapat dilaksanakan secara optimal, tentunya

membutuhkan atau diperlukan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana atau bahan, alat yang dituangkan dalam perencanaan strategis berupa kegiatan yang prioritas segera dilaksanakan untuk mendukung kelancaran tugas operasional perkarantinaaan baik bersifat teknis dan administrasi.

B. Karakteristik Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar

Berdasarkan Undang-undang N0.16 tahun 1992, tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan perkarantinaaan. Oleh karena itu dalam era globalisasi/perdagangan bebas kekuatan pasar dirasakan semakin kuat, sehingga tidak ada suatu negara yang tidak ikut arus untuk mengakomodasi kebutuhan pasar secara lebih efektif, sehingga menjadi tonggak perubahan tatanan perekonomian dunia berdasarkan ketentuan WTO, arus barang dan jasa harus bebas tanpa hambatan antar negara. Demikian halnya dengan lalu lintas komoditi wajib periksa karantina pertanian dilaksanakan melalui pembebasan hambatan-hambatan tarif dan non tarif. Kondisi ini menuntut setiap negara memiliki daya saing yang tinggi untuk dapat memenangkan pasar global. Berkaitan dengan hal tersebut di atas stabilitas ekonomi dan keberhasilan usaha agribisnis, serta kestabilan ketahanan pangan secara nasional dapat diwujudkan sebagai salah satu upaya perlindungan sumberdaya alam hayati adalah diselenggarannya tindakan karantina pertanian terhadap komoditi wajib periksa karantina baik ekspor, impor dan domestik, serta diharapkan karantina pertanian untuk menjawab tuntutan lingkungan sesuai tupoksi organisasi yang diemban untuk memberikan kontribusi dalam

perdagangan produk pertanian dengan mengoptimalkan peran karantina sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelestarian sumber daya alam dan ketahanan pangan yang meliputi aspek keamanan pangan yang sehat utuh dan halal.
2. Mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk melalui sertifikasi kesehatan tanaman, hewan dan produknya yang akan di ekspor dan diantar areakan.
3. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pemakai jasa karantina pertanian.
4. Memfasilitasi lalu lintas perdagangan komoditi pertanian dalam rangka kelancaran perdagangan domestik dan internasional.

C. Geografis Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar

Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar adalah salah satu unit pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi bertanggung jawab kepada kepala badan karantina pertanian dan secara administrasi operasional tindakan karantina pertanian berkoordinasi dengan instansi terkait di provinsi Sulawesi selatan dan kabupaten kota agar pelaksanaan tugas karantina pertanian dalam hal cegah tangkal HPHK/OPTK dari suatu area ke area lain dalam wilayah Republik Indonesia atau dari luar negeri masuk ke Indonesia melalui tempat pemasukan dan pengeluaran di pelabuhan laut, Bandar udara, dan kantor pos yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar berkedudukan di Kota Makassar yang sangat strategis karena

berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan dari wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan timur Indonesia. Dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan demikian wilayah Kota Makassar dengan ketinggian bervariasi dari permukaan laut. Oleh karena itu Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dan diapit oleh dua muara sungai, yakni sungai tallo yang bermuara di bagian utara Kota Makassar dan sungai jene'berang yang bermuara di selatan Kota Makassar. Luas wilayah Kota Makassar kurang lebih 175,77 km² dan termasuk 11 pulau di selat Makassar dengan luas wilayah perairan kurang lebih 100 km².

Berdasarkan hal tersebut diatas selintas mengenai letak dan lokasi Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar sangat strategis dari sisi kepentingan ekonomi dalam hal perdagangan komoditi lalu lintas pertanian dan peternakan serta produknya. Dari sisi ekonomi Kota Makassar menjadi simpul jasa distribusi pangan yang lebih efisien dibanding dengan daerah atau provinsi lain di kawasan timur Indonesia, maka kebijakan makro pemerintah yang seolah-olah dijadikan Kota Makassar sebagai *home base* pengelolaan produk pangan di kawasan timur Indonesia. Dengan demikian Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar berdasarkan Undang-undang no. 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan perkarantinaan.

Berdasarkan hal tersebut, dimana pemerintah telah menentukan bahwa salah satu strategi untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati, hewani dan nabati melalui penyelenggaraan perkarantinaan yang berkualitas, oleh karena itu ketersediaan sumber daya manusia, sarana

dan prasarana serta anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan perkarantina menjadi perhatian dan dioptimalkan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, apabila Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar dilihat dari letak geografis, maka Kota Makassar sebagai tempat untuk kawasan pengembangan budi daya tanaman pangan dan hortikultura serta sentra peternakan yang potensial untuk dapat dikembangkan dan perlu dijaga dan dilestarikan keamanan pangan secara nasional.

Peran karantina dalam pembangunan ekonomi nasional semakin penting dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri serta pengembang hasil devisa Negara. Oleh karena itu, pembangunan karantina ke depan perlu disesuaikan dengan pembangunan pertanian yang luas dan skala yang besar guna peningkatan pendapatan kesejahteraan petani.

D. Data Frekuensi/Volume Lalu Lintas

Adapun data frekuensi/volume lalu lintas adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Frekuensi / Volume Lalu Lintas Tahun 2015

| Tahun 2015 | Ekspor | Impor | Domestik Masuk | Domestik Keluar |
|--------------------|-----------|----------|----------------|-----------------|
| Karantina Hewan | 2 koli | 92 Koli | 6652 Koli | 5063 Koli |
| Karantina Tumbuhan | 3063 koli | 162 Koli | 7680 Koli | 12395 Koli |

BAB II

IDENTIFIKASI MASALAH

2.1. Permasalahan Operasional

A. Permasalahan Operasional Bidang Karantina Hewan

1. a. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 44/permentan/ot.140/3/2014 tentang tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina.
- b. Nota Kesepahaman antara Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Nomor: 1848/HK.020/3/L//2012.
2. Pemasukan bebek dan produknya ke Sulawesi Selatan. (Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 443.4/228/Disnakeswan tahun 2013 tentang Pengendalian Penyakit AI pada Itik).

B. Permasalahan Operasional Bidang Karantina Tumbuhan

1. Edaran Kapus No.339/1/2015 Tindakan karantina Terhadap ekspor buah Kelapa segar Ke China, terkait wajib difumigasi;
2. Untuk ekspor biji kakao, Import permit Malaysia mempersyaratkan bebas cendawan *Fusarium oxysporium* f. sp. Pisi;
3. Belum semua pihak pelayaran yang menggunakan container menginformasikan cargo manifestnya dan terkadang data cargo manifest tidak sesuai dengan isi muatan yang mengakibatkan pengawasan pemasukan/ pengeluaran Media Pembawa tidak optimal sehingga memungkinkan adanya Media Pembawa yang tidak dilakukan tindakan karantina;
4. Data E-plaq dari daerah asal media pembawa dengan daerah tujuan terkait nama alat angkut dan tanggal kedatangan kapal terkadang tidak sesuai sehingga petugas karantina kesulitan dalam hal pengawasan;

5. Surat edaran Dirjen perkebunan nomor : 129/SR.120/E2.1/03/07 tentang pengawasan peredaran benih kelapa sawit dalam negeri lintas provinsi, apabila ada indikasi penyimpangan mutu benih/dokumen benih belum ada kejelasan pelimpahan wewenang ke Karantina Tumbuhan untuk melakukan tindakan karantina;
6. Penggunaan peralatan pengujian Laboratorium PSAT belum optimal, sehingga pengujian PSAT masih dilakukan oleh laboratorium yang telah ditetapkan sesuai permentan 88/2011.

C. Permasalahan Operasional Bidang Pengawasan dan Penindakan

1. Koordinasi dengan CIQS belum berjalan maksimal, sehingga informasi tentang muatan kapal (cargo manifest) belum sepenuhnya disampaikan kepada petugas karantina pertanian sehingga memungkinkan masih ada media pembawa tidak dilakukan tindakan karantina;
2. Koordinasi yang dilakukan petugas fungsional baik fungsional bidang karantina hewan maupun bidang tumbuhan dalam melaksanakan tindakan 8P sebaiknya bukan hanya ke bidang teknis dalam hal adanya permasalahan di lapangan;
3. Tingkat pengetahuan dan pemahaman petugas karantina terhadap peraturan perundang-undangan masih berbeda-beda, menyebabkan pelaksanaan 8P khususnya 3P masih ada ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Produktifitas Sumber Daya Manusia (Intelijen, Tenaga pengawasan/ Patroli, PPNS) belum optimal, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kewasdakan khususnya pengawasan di lapangan belum optimal;
5. Belum Optimalnya pemberdayaan PPNS akibat tugas rangkap selaku pejabat fungsional.

2.2. Permasalahan Non Operasional

1. Ketersediaan anggaran perjalanan rekonsiliasi PNBP E-plaq dan E-qvet serta pengelolaan dokumen utama KH/KT di wilayah kerja belum optimal, sehingga penyampaian laporan SAIBA dan SIMAK BMN tidak tepat waktu.
2. Realisasi Penilaian PAK dan HAPAK sering terlambat diterima dan di UPT akibatnya kenaikan pangkat pejabat fungsional POPT dan HPHK tidak tepat waktu.
3. Penginputan kenaikan pangkat KPPI belum bisa diinputkan di UPT.

2.3. Isu-Isu Strategis

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyelenggaraan perkarantina sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi serta kemampuan sumberdaya manusia yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan perkarantina sesuai ketentuan yang berlaku agar pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dapat diwujudkan, maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Memiliki laboratorium karantina hewan dan karantina tumbuhan, untuk melakukan pemeriksaan dan uji-uji diagnostik laboratorium, guna memberikan kepercayaan terhadap kesehatan dan keamanan pangan.
- b. SPS merupakan isu perdagangan yang digunakan dalam proteksi/promosi perdagangan komoditas pertanian
- c. Karantina pertanian merupakan salah satu unsur CIQ (Custom, Immigration, Quarantine) yang bertugas dipintu masuk/keluar di pelabuhan laut dan Bandar Udara.
- d. Tersedianya pegawai/pejabat fungsional medik veteriner, paramedik veteriner dan POPT ahli dan terampil serta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), Polsus untuk mendukung

penyelenggaraan perkarantinaan secara optimal dan penegakan supremasi hukum.

- e. Adanya sistem audit Barantan dan sistem pelaporan SIPUSRA, SIKAWAN, SAI dan SABMN yang mendukung penyampaian laporan kegiatan operasional secara cepat dan tepat serta laporan neraca keuangan.
- f. Pencatatan setoran penerimaan Negara bukanpajak (PNBP) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, fleksibilitas dan kecepatan penerimaan Negara kementerian keuangan telah mengembangkan sistem informasi PNBP Online (SIMPONI) untuk memfasilitasi penyetoran PNBP dengan menggunakan sistem Billing.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Kebijakan Kementerian Pertanian dan Keterkaitan Strategi Badan Karantina Pertanian

Sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang didalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian (Kementan) 2015-2019 menggambarkan pentingnya Sumberdaya Pertanian Lokal untuk dilindungi dalam rangka membangun Pertanian industrial untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani. Cara pandang jauh kedepan Barantan tentang keberhasilan pembangunan pertanian dapat dipastikan harmonis dengan Departemen Pertanian. Dapat dikatakan pula bahwa VISI Barantan telah berada searah dengan VISI Deptan.

VISI KEMENTAN :

“Pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya local untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani”

VISI BARANTAN :

“Menjadi instansi yang tangguh dan terpercaya dalam perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”.

Selanjutnya ada empat misi Kementan yang didukung langsung misi Barantan adalah :

1. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan;
2. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi;

3. Mengamankan plasma nutfah dan meningkatkan pdayagunaannya untuk mendukung pembangunan pertanian;
4. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan professional.

Salah satu dari 4 (empat) sukses bidang Pertanian yaitu “Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor’ merupakan cerminan dari kebijakan pembangunan pertanian nasional pada bidang Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian”. Badan Karantina Pertanian berperan penting dalam pencapaian target sukses “Nilai tambah, daya saing dan ekspor. Adapun kerangka logis yang melandasi peran tersebut adalah :

“Nilai tambah, daya saing, dan ekspor komoditas pertanian berhubungan dengan 3 faktor utama yang mempengaruhinya :

- Faktor produk itu sendiri yang berkaitan dengan 1) kapasitas produksi yang mendukung volume permintaan; 2) keberlanjutan produksinya untuk menjamin pasokan; 3) Mutu/kualitas produk untuk menjamin spesifikasi permintaan pasar.
- Kemampuan didalam promosi, negosiasi dan diplomasi baik oleh sektor industrinya maupun pemerintah selaku fasilitator.
- Hambatan teknis didalam perdagangan internasional :
- SPS-Barrier, berhubungan dengan status keberadaan dan penyebaran hama dan penyakit hewan dan organism pengganggu tumbuhan.
- Technical Barrier, berhubungan dengan tata kelola produksi yang baik (SSOP-sanitation standards operating procedurs; HHCCP-Hazard Analysis dan Critical Control Point).

Faktor ketiga merupakan peran strategis Barantan melalui misi pelaksanaan karantina hewan dan tumbuhan dalam rangka mencegah masuk, menyebar, dan keluarnya HPHK (Hama dan Penyakit Hewan Karantina) dan OPTK (organism pengganggu tumbuhan Karantina) serta pengawasan keamanan hayati hewan dan

tumbuhan melalui “outcome’ yang dihasilkan yaitu Pelayanan dan pengawasan yang efektif.

3.2. Strategi dan Kegiatan

Strategi Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar dalam menyikapi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang diinginkan, agar kelancaran operasional tindakan karantina pertanian dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu ditekankan bahwa penerapan strategi pelayanan publik yang profesional mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi maka strategi yang akan diterapkan adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian sasaran yang telah ditentukan agar pencapaian visi dan misi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut di atas ada beberapa strategi yang perlu ditindaklanjuti dan merupakan acuan atau pedoman dalam menentukan kebutuhan/kegiatan prioritas yang dituangkan dalam perencanaan strategis sebagai berikut :

- a. Mengembangkan manajemen pelayanan prima
- b. Mengembangkan teknik dan metode uji-uji diagnostik laboratorium agar komoditi karantina pertanian yang dilalu lintaskan bebas dari HPHK dan OPTK.
- c. Membangun jejaring kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait, agar pelaksanaan tindakan operasional perkarantinaan dapat dilaksanakan dengan lancar serta mendapat dukungan.
- d. Mengembangkan sistem informasi dan *public awereness*

Dalam melaksanakan rencana strategis tersebut, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar mengacu pada Renstra Badan Karantina Pertanian TA. 2015 – 2019 yang telah menetapkan 2 (dua) kegiatan utama yang harus ditindaklanjuti sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendukung pelaksanaan tugas perkarantina sehari-hari yang dicapai dan dituangkan dalam beberapa indikator keluaran dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan Pegawai
2. Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vaksinasi
3. Kelancaran Administrasi Kegiatan
 - a. Terselenggaranya pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh.
 - b. Terselenggaranya pakaian dinas pegawai
 - c. Terselenggaranya pakaian kerja satpam/ tenaga lainnya
 - d. Terselenggaranya pembuatan pas pelabuhan laut/udara
 - e. Terselenggaranya perawatan gedung kantor
 - f. Terselenggaranya perbaikan peralatan gedung kantor
 - g. Terselenggaranya pengadaan peralatan kantor
 - h. Terselenggaranya perawatan kendaraan roda 4 dan 6
 - i. Terselenggaranya sewa gedung kantor
 - j. Terselenggaranya perawatan kendaraan roda 2
 - k. Terselenggaranya Langganan daya dan jasa
 - l. Terselenggaranya Jasa keamanan dan kebersihan
 - m. Terselenggaranya Operasional perkantoran dan pimpinan.

b. Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan

Kegiatan peningkatan ketahanan pangan ini mengoperasionalkan pembangunan karantina pertanian dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun di daerah. Oleh karena itu pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman dan ternak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan. Untuk itu berkaitan

dengan penjabaran program tersebut yang dituangkan dalam sasaran program dan sub kegiatan terhadap Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) sebagai berikut :

1. Terselenggaranya administrasi kegiatan
2. Terselenggaranya pengembangan sistem informasi manajemen
3. Terselenggaranya penyusunan kegiatan dan rencana kerja/teknis
4. Terselenggaranya penyuluhan dan penyebaran informasi
5. Terselenggaranya evaluasi/laporan kegiatan
6. Terselenggaranya pengadaan perlengkapan sarana gedung
7. Terselenggaranya pengadaan meubelair
8. Terselenggaranya pengadaan alat pengolah data
9. Terselenggaranya pengadaan alat laboratorium
10. Terselenggaranya perluasan gedung kantor induk
11. Terselenggaranya pembangunan laboratorium tahap ke II
12. Terselenggaranya pembangunan kandang instalasi
13. Terselenggaranya pembangunan pagar IKH Pate'ne
14. Terselenggaranya rehab Pembangunan Laboratorium IKH Pate'ne
15. Terselenggaranya rehab gudang Pate'ne
16. Terselenggaranya rehab Pos Jaga IKH Pate'ne
17. Terselenggaranya pembangunan IKH Bajoe
18. Terselenggaranya pembangunan rehab Laboratorium Bajoe
19. Terselenggaranya rehab Kantor Bajoe
20. Terselenggaranya pembangunan IKH Jene'ponto
21. Terselenggaranya pembangunan Pagar IKH Jene'ponto
22. Tersedianya Fasilitas Kendaraan Operasional Roda 2 dan 4
23. Terselenggaranya pengadaan alat studio dan komunikasi
24. Terselenggaranya pengadaan kendaraan roda – 2 (dua)
25. Terselenggaranya pengadaan kendaraan roda -4 (empat)

26. Terselenggaranya rehabilitasi gedung
27. Terselenggaranya pengembangan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.
28. Terselenggaranya perawatan sarana penunjang operasional.
29. Terselenggaranya pelayanan teknis karantina pertanian.
30. Terselenggaranya kerjasama dan koordinasi pengawasan/penyidikan karantina.
31. Terselenggaranya akreditasi laboratorium.
32. Terselenggaranya pemantaun daerah sebar OPTK.
33. Terselenggaranya koleksi OPT/OPTK

c. Indikator Keberhasilan Kegiatan

Indikator keberhasilan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Namun indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan ke dalam 5 (lima) kelompok sebagai berikut :

1. Masukan (*input*) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program perkarantinaan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs. Misalnya sumber daya manusia, anggaran, sarana/prasarana, teknologi atau teknik dan metode.
2. Keluaran (*Output*) yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program perkarantinaan berdasarkan masukan yang digunakan, yaitu keluaran pada setiap kegiatan dan tupoksi yang diselenggarakan.
3. Hasil (*Outcomes*) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh efektifitas perlindungan pertanian dari ancaman HPHK dan OPTK serta meningkatnya daya saing dan akses komoditas pertanian di perdagangan internasional.
4. Manfaat (*Benefits*) yaitu kegunaan suatu keluaran (*Output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, yaitu tersedianya

- pangan sehat, utuh, aman dan halal serta peningkatan pendapatan pelaku usaha/petani.
5. Dampak (*impacts*) yaitu ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya.
 6. Indikator pencapaian tujuan Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar dapat dilihat pada matrik Rencana Strategi tahun 2015 – 2019.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar diberi tanggung jawab untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas penyelenggaraan administrasi pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan sasaran peningkatan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang ditempuh adalah penggabungan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang profesional dan akuntabel melalui “Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.”

3.3. Analisa Resiko Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT)

Untuk mendapatkan dan mencari berbagai strategi alternatif dilakukan analisa resiko Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT), untuk menganalisa kondisi lingkungan yang bersifat intern yang berupa kekuatan dan kelemahan, serta kondisi lingkungan ekstern yaitu adanya peluang dan hambatan atau ancaman.

Komoditi wajib periksa karantina pertanian merupakan basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat, baik di lingkup domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh

komoditas pertanian dan kontribusinya pada perdagangan, serta pasar internasional ditentukan oleh beberapa faktor, yakni :

- a. Kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian yang didukung oleh informasi tata kelola produksi yang baik (GAP/GFP/SOP);
- b. Kemampuan promosi dan negoisasai internasional dengan prinsip saling menguntungkan dan
- c. Keberadaan dan status penyakit.

Berdasarkan hal tersebut salah satu faktor yang diidentifikasi sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan proyek prevalensi hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina di suatu area/kawasan. Dan surveilens yang dimiliki dan dilaksanakan dengan sistem pengendalian yang dibangun berupa pemantauan hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman), banyak faktor yang berhubungan dengan ancaman resiko penyakit pada hewan dan tumbuhan, serta status penyakit di suatu area yang terkait dengan fungsi Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Tabel 3.1 Faktor Internal

| No. | Aspek | Kekuatan (Strengths) | Kelemahan (Weaknesses) |
|-----|---|--|--|
| 1. | Adanya landasan hukum berupa undang-undang no. 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, Peraturan Pemerintah no 82 | Sebagai dasar kewenangan penyelenggaraan perkarantinaan pertanian. | Masyarakat belum memahami undang-undang yang dimaksud. |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 2. | <p>tahun 2000 tentang karantina hewan dan Peraturan Pemerintah noo. 14 tahun 2002 tentang karantina tumbuhan.</p> <p>Sumber Daya Manusia (SDM)</p> | <p>a. Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar memiliki SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, yang terdiri dari tenaga fungsional karantina hewan (Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner). Fungsional karantina tumbuhan (Pengendali Organisme</p> | <p>a. Distribusi SDM belum memperhitungkan analisis beban kerja baik tingkat pusat dan UPT.</p> <p>b. Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional.</p> |
|----|--|---|--|

| | | | |
|----|--------------------------------|---|--|
| | | <p>Pengganggu Tumbuhan – POPT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), POLSUS, dan intelijen Karantina.</p> <p>b. Kompetensi SDM Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar semakin meningkat.</p> <p>c. Kemampuan Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar dalam penyediaan diklat teknis meningkat</p> | |
| 2. | Sarana prasarana/Infrastruktur | Mempunyai sarana dan prasarana operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar | a. Sarana dan prasarana operasional perlu penataan dan peningkatan kualitas sesuai |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>Karantina Pertanian (BBKP) Makassar yang berkualitas.</p> | <p>peruntukkannya dan standar.</p> <p>b. Belum semua sarana dan prasarana memenuhi standar minimal.</p> <p>c. Teknologi dan sistem informasi belum cukup memuaskan pemanfaatannya dalam meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja internal.</p> <p>d. Sarana dan prasarana operasional masih memerlukan penataan dan peningkatan kualitas mengikuti peningkatan beban operasional dan kepuasan</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|----|----------------------|---|--|
| | | | masyarakat dalam pelayanan. |
| 3. | Tata laksana | Setiap kegiatan pelaksanaan operasional perkarantinaan telah dibuatkan standar operasional prosedur (SOP) untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan tugas dimaksud. | SOP tersebut perlu disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| 4. | Pengelolaan Anggaran | Dari aspek pendanaan, selain APBN Rupiah murni, Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sampai dengan saat ini merupakan PNBP yang disetor ke kas negara. | Alokasi anggaran operasional Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar masih terbatas. |
| 5 | Kelembagaan | Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar | Sinergitas antara instansi belum optimal. |

| | | | |
|---|------------------|--|--|
| | | telah ditunjuk sebagai salah satu anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. | |
| 6 | Pelayanan Publik | <p>a. Komitmen dari pimpinan dan pegawai Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik semakin menguat.</p> <p>b. Semakin membaiknya mutu sarana prasarana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.</p> <p>c. Telah adanya pengukuran Indeks Kepuasan</p> | Sistem pelayanan dan pengawasan pelaksanaan perkarantinaaan yang telah dituangkan dalam suatu produk hukum belum optimal penerapannya. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>Masyarakat (IKM) sebagai bagian dari system monev perbaikan pelayanan publik.</p> <p>d. Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar telah menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan telah ditetapkan oleh ombudsman RI sebagai zona kepatuhan tinggi</p> <p>e. Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2008</p> <p>f. Balai Besar Karantina</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | Pertanian (BBKP) Makassar telah menerapkan ISO Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO 17025 : 2008 | |
|--|--|--|--|

2. Faktor Eksternal

Tabel 3.2 Faktor Eksternal

| No. | Aspek | Peluang (Opportunities) | Tantangan (Threats) |
|-----|---|--|---|
| 1. | Sistem Ekonomi perdagangan domestik dan internasional | a. Peningkatan jumlah konsumen produk pertanian dunia. b. Integrasi perdagangan dunia atau antar kawasan (WTO, MEA, APEC, EU, dsb) c. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia menghasilkan sejumlah perjanjian dan kesepakatan. | a. Distribusi SDM belum memperhitungkan analisis beban kerja baik tingkat pusat dan UPT. b. Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional. |

| | | | |
|----|--------------------|--|--|
| | | <p>d. Adanya ketentuan-ketentuan antar Negara yang harus disepakati dan telah harmoni di dalam MoU.</p> <p>e. Terdapat berbagai kesepakatan internasional terkait penjaminan akses pasar (OIE,Codex,dsb).</p> <p>f. Berlakunya kebijakan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement – FTA), Antara lain yaitu Indonesia – china, Indonesia – korea, Indonesia-jepang</p> | |
| 2. | Perkembangan IPTEK | a. Kerjasama penerapan standarisasi mutu secara internasional | a. Data hasil riset yang dilakukan oleh pihak Indonesia sangat mudah diakses |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | berbasis ISO. b. Pembelajaran dari praktik otoritas kompeten dari Negara-negara lain. c. Tawaran kerjasama pengembangan jejaring riset internasional. d. Ketersediaan sumber pendanaan internasional e. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar negeri. | oleh pihak luar. b. Data hasil riset yang dilakukan pihak asing yang sangat sulit diakses oleh peneliti Indonesia. c. Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas. d. Kemajuan dalam bidang bioteknologi dan teknologi pengolahan pangan. e. Banyaknya HPHK dan OPTK dari berbagai Negara. f. Makin beragamnya jenis media pembawa HPHK dan OPTK. |
|--|--|---|---|

| | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|
| 3. | Volume dan kompleksitas perdagangan | <p>a. Pengembangan dan produksi berbagai produk untuk kesehatan hewan dan tanaman (pencegahan, diagnosis, dan pengobatan)</p> <p>b. Jenis asing invasif (Invasive Alien Specie/IAS) telah dapat diidentifikasi berdampak penting terhadap lingkungan dan kelestarian sumber daya hayati.</p> | <p>a. Adanya bioterorisme</p> <p>b. Semakin beragamnya bentuk dan jenis komoditas berkaitan dengan produk-produk rekayasa genetik (Genetically Modified Organism/GMO)</p> <p>c. Sulitnya menelusuri tempat asal usul suatu produk.</p> |
|----|-------------------------------------|--|--|

3.4. Rencana Kerja Sampai Dengan 5 Tahun (2015-2019)

A. Penguatan Kelembagaan

Dalam rangka penguatan kelembagaan Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkup pelabuhan maupun Bandar udara (CIQS). Adapun rencana kerja sampai dengan 5 tahun ke depan (2015-2019) dalam hal penguatan kelembagaan tercantum dalam matriks.

B. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK

dan OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia maka, peningkatan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) terus diupayakan semaksimal mungkin serta member kesempatan dan motivasi pegawai untuk dapat mengikuti setiap pelatihan yang diselenggarakan Badan Karantina Pertanian atau UPT lain yang mempunyai keterkaitan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, agar para pegawai memiliki potensi peningkatan mutu dan profesionalisme serta sikap pengabdian yang tinggi. Adapun rencana kerja sampai dengan 5 tahun ke depan (2015-2019) dalam hal untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) tercantum dalam matriks.

C. Pengembangan Infastruktur/Sarana/Prasarana

Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar adalah salah satu Unit Pemakai Barang (UPB) yang bertanggung jawab terhadap pengurusan barang milik kekayaan Negara yang berada di bawah penguasaanya baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dalam rangka tertib administrasi dan pemanfaatan barang inventaris telah dilaksanakan penatausahaan batang inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu tugas urusan rumah tangga khususnya pengurus barang inventaris milik negara melakukan pengelolaan barang inventaris untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari baik secara teknis operasional maupun administrasi perkantoran yang dikelompokkan ke dalam 3 jenis barang sebagai berikut :

1. Barang tidak bergerak terdiri dari :
 - Tanah
 - Bangunan
2. Barang bergerak meliputi :
 - Kendaraan dinas operasional berupa mobil dan motor

- Sarana perkantoran antara lain meubelair, peralatan laboratorium, komputer, telepon, air, listrik, dll.
3. Barang habis pakai misalnya atk, bahan pemeriksaan laboratorium dll.

Sarana dan prasana tersebut diatas dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Adapun rencana kerja sampai dengan 5 tahun ke depan (2015-2019) mengenai pengembangan infastruktur/sarana/prasarana tercantum di dalam matriks.

BAB VI

PENUTUP

Rencana strategis Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar 2015 – 2019 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian 2015 – 2019 dan disusun berdasarkan Pedoman Teknis Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian.

Secara umum rencana strategis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang berbasis kinerja. Beberapa tahapan yang akan menjadi perhatian untuk dipersiapkan adalah : 1) Pembangunan Gedung Laboratorium tahap II; 2) Pembangunan perluasan gedung kantor induk; 3) Peningkatan sarana dan prasarana; 4) Akreditasi dan penambahan ruang lingkup Laboratorium; 5). Membangun kerjasama yang harmonis dengan instansi terkait ; 6) Meningkatkan Kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan dan 7) Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pengguna jasa) dengan sistem manajemen mutu.

Rencana strategis ini disusun untuk jangka waktu lima tahun, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyempurnaan dan perbaikan sesuai lingkungan strategis yang berkembang.

MATRIKS RENCANA KERJA 5 TAHUN (TAHUN 2015-2019)

| Program/Subprogram | Kegiatan | | Tahun Pelaksanaan | | | | |
|--------------------------|---|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Uraian | Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Penguatan Kelembagaan | 1. Koordinasi dengan instansi terkait dengan lingkup pelabuhan maupun Bandara (CIQS) dan pemerintah daerah lingkup BBKP Makassar. | a. Terlaksananya workshop Sentra Komunikasi Mitra Karantina. | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | | b. Terlaksananya Forum Group Discussion (FGD). | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | | c. Terlaksananya Coffee morning dengan instansi terkait di pelabuhan dan di bandara. | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | 2. Membangun kerjasama yang harmonis dengan instansi terkait. | a. Menjalin kerjasama melalui MoU dengan instansi terkait | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | | b. Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait tentang tupoksi karantina | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2. Penguatan SDM | 1. Pengembangan / peningkatan keterampilan pegawai yang professional | a. Pelatihan teknis mengenai pengujian ELISA terhadap Trypanosoma sp | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
| | | b. Pelatihan Teknis cemaran biologi pada Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Hewan Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
| | | c. Pelatihan Teknis pengembangan perlakuan karantina merujuk standar International Plant Protection Convention (IPPC) | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
| | | d. Pelatihan mengenai pengujian terhadap | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | bakteri Salmonella sp | | | | | |
| | | e. Pelatihan pengambilan contoh/sample KT | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
| | | f. Pertemuan teknis analis lab dan staf lab pestisida | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
| | | g. Pelatihan mengenai PPC (Petugas Pengambil Contoh) | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
| | | h. Pelatihan mengenai teknik pengambilan sampel darah | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
| | | i. Pelatihan mengenai analisa risiko penyakit hewan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
| | | j. Pelatihan mengenai teknik sampling pada hewan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
| | | k. Bimbingan teknik pelaksanaan perizinan penangkaran / pengedar tumbuhan dan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | satwa liar hasil penangkaran | | | | | |
| | | l. Uji banding antar laboratorium untuk target uji <i>Tilletia indica</i> dengan metode uji pengamatan langsung | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
| | | m. Pelatihan mengenai Handling dan Restrain pada hewan kesayangan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
| | | n. Pelatihan mengenai pengujian terhadap bahan baku pakan ternak | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
| | | o. Pelatihan intelijen | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
| | | p. Inhouse Training pengelolaan kearsipan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
| | 2. Pengelolaan keuangan dan perlengkapan SIMAK BMN yang efektif | a. Pelatihan SAI | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
| | | b. Pelatihan bendahara pengeluaran | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
| | | c. Pelatihan bendahara penerima | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|---|
| | <p>3. Pengelolaan Administrasi kepegawaian dan tata laksana ketatausahaan yang berkualitas</p> | <p>d. Pelatihan SIMAK BMN</p> <p>a. Pelatihan SIMPAK/SAPK</p> <p>b. Inhouse training pengelolaan kearsipan</p> <p>c. Inhouse training SMM</p> <p>d. Inhouse training SPP</p> <p>e. Inhouse Training pengembangan SDM yang amanah</p> | <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> | <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> | <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> | <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> | <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> |
| | <p>4. Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern yang akuntabel</p> | <p>a. Pembinaan SPI</p> <p>b. Pelatihan PPK</p> | <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> | <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> | <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> | <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> | <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> |
| <p>3. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana</p> | <p>1. Pengadaan alat pengolah data</p> | <p>a. Tersedianya komputer untuk kantor balai dan Wilker</p> <p>b. Tersedianya laptop untuk Kantor Balai dan Wilker</p> <p>c. Tersedianya Printer untuk Kantor Balai dan Wilker</p> <p>d. Tersedianya UPS untuk kantor Balai</p> | <p>1 unit</p> <p>2 unit</p> <p>-</p> <p>2 unit</p> | <p>2 unit</p> <p>1 unit</p> <p>-</p> <p>-</p> | <p>12 unit</p> <p>10 unit</p> <p>15</p> <p>9 unit</p> | <p>10 unit</p> <p>5 unit</p> <p>5</p> <p>2 unit</p> | <p>10 unit</p> <p>5 unit</p> <p>5</p> <p>2 unit</p> |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------|---------------------|---|---|
| | | dan Wilker | | | | | |
| | 2. Pembangunan / Perluasan gedung kantor induk | Pembangunan / Perluasan gedung kantor induk | - | 524 m ² | - | - | - |
| | 3. Pembangunan Laboratorium Tahap II | Pembangunan gedung laboratorium tahap II | - | 644 m ² | - | - | - |
| | 4. Pembangunan Kandang, Pagar, IKH di Wilker Lingkup BBKP Makassar | a. Pembangunan kandang instalasi Patte'ne | - | - | 3000 m ² | - | - |
| | | b. Pembangunan pagar IKH Patte'ne | - | - | 1800 m ² | - | - |
| | | c. Rehab pembangunan laboratorium IKH Pate'ne | - | - | 104 m ² | - | - |
| | | d. Rehab gudang Pate'ne | - | - | 50 m ² | - | - |
| | | e. Rehab pos Jaga IKH Pate'ne | - | - | 50 m ² | - | - |
| | | f. Pembangunan IKH Bajoe | - | 415 m ² | - | - | - |
| | | g. Pembangunan/ Rehab Laboratorium Bajoe | - | 170 m ² | - | - | - |
| | | h. Rehab Kantor Bajoe | - | 533 m ² | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|---|--|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| | | i. Pembangunan IKH Jene'ponto | - | 1174 m ² | - | - | - |
| | | j. Pembangunan pagar IKH Jene'ponto | - | 250 m ² | - | - | - |
| | 5. Pengadaan Bahan / Alat Laboratorium KH/KT dan Pengawasan Kemanan Hayati | a. Tersedianya alat laboratorium KH | - | 2 unit | - | - | - |
| | | b. Tersedianya alat laboratorium KT | 2 unit | 3 unit | - | - | - |
| | | c. Tersedianya alat pengawasan keamanan Hayati Hewani/Nabati | - | - | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| | | d. Tersedianya bahan laboratorium KH/KT dan Pengawasan Keamanan Hayati | 10 paket | 12 paket | 12 paket | 12 paket | 12 paket |
| | 6. Pengadaan Peralatan dan Mesin | a. Tersedianya kendaraan roda-4 untuk kantor Balai dan Wilker | 1 unit | - | 4 unit | 3 unit | 2 unit |
| | | b. Tersedianya kendaraan roda-2 untuk kantor Balai | 2 unit | - | 4 unit | 4 unit | 4 unit |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--------|-------|--------|--------|--------|
| | 7. Pengadaan Meubelair | dan Wilker Tersedianya <i>meubelair</i> untuk kantor balai dan wilker | - | - | 3 unit | 3 unit | 3 unit |
| | 8. Penyediaan perlengkapan sarana gedung | a. Tersedianya AC untuk kantor balai dan wilker | - | - | 2 unit | 2 unit | 2 unit |
| | | b. Tersedianya peralatan gedung lainnya | - | - | 2 unit | 2 unit | 2 unit |
| | 9. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi | Tersedianya alat studio dan komunikasi di kantor balai dan wilker | 4 unit | - | 4 unit | 4 unit | 4 unit |
| | 10. Pengembangan informasi yang cepat, tepat dan akurat | Tersedianya software pengelolaan data dan informasi EPLAQ dan SIKAWAN di Wilker | 40 % | 50 % | 60 % | 80 % | 100 % |
| | 11. Penyediaan sistem informasi perkarantinaan yang mudah diakses masyarakat | Ter sedianya informasi perkarantinaan yang up to date | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | 12. Pelaksanaan uji coba pengembangan teknik metode pelaksanaan perkarantinaan | Tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati | - | - | 4 | 4 | 4 |

